

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Pengertian Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu bentuk migrasi yang diatur dan dibiayai oleh pemerintah serta ditetapkan melalui undang-undang. Berdasarkan undang-undang RI No. (3) tahun 1972 tentang ketentuan pokok transmigrasi menyatakan bahwa : “Transmigrasi adalah pemindahan atau kepindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia, guna kepentingan negara dan alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah”.

Selanjutnya menurut Heeren (1979: 15) “Transmigrasi merupakan perpindahan orang dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya di batas negara dan dalam rangka kebijaksanaan nasional untuk tercapainya pola penyebaran penduduk yang seimbang”. Jadi berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya dan dalam wilayah yang telah ditetapkan pemerintah, dalam rangka kepentingan pembangunan nasional atau alasan-alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Pengertian transmigran menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1972 dalam Geografi Penduduk dan Demografi (Trisnaningsih, 1998: 60) adalah:

“Setiap warga Negara Republik Indonesia yang secara sukarela dipindahkan atau pindah dari suatu daerah yang padat penduduknya yang ditetapkan dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan negara atau alasan-alasan lain yang dipandang perlu oleh negara”.

Dari uraian di atas diketahui bahwa transmigran merupakan setiap warga Negara Republik Indonesia yang dengan sukarela dipindahkan atau pindah dari daerah yang padat ke daerah yang jarang untuk kepentingan pembangunan. Menurut Undang-Undang Transmigrasi No 15 Tahun 1997 Pasal 12 selain dari daerah yang padat, para transmigran juga berasal dari daerah yang terkena bencana, daerah yang terjadi konflik, dan daerah yang dijadikan proyek untuk kepentingan umum.

## **2. Syarat Transmigran**

Syarat untuk menjadi seorang transmigran tidaklah mudah, karena tugas di daerah transmigrasi tidak ringan dan diperlukan beberapa syarat. Syarat-syarat untuk dapat menjadi transmigran yaitu antara lain:

1. Usia masih tergolong usia produktif, karena pekerjaan awal membuka daerah baru adalah berat.
2. Calon transmigran seyogyanya memiliki ketrampilan lain diluar pertanian, seperti ketrampilan dibidang kerajinan tangan, pertukangan dan sejenisnya agar dapat diperoleh tambahan pendapatan disamping hasil bertani.
3. Para calon transmigran harus dalam status kawin, agar dapat mempunyai ketenangan hidup dalam menghadapi pekerjaan di daerah baru.  
(Bintarto, 1998: 62).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi seorang transmigran diperlukan usia yang masih produktif karena pekerjaan awal adalah membuka daerah yang baru adalah pekerjaan yang berat, transmigran juga harus dalam

status kawin agar mendapatkan ketenangan hidup dalam menghadapi pekerjaan yang baru, calon transmigran juga harus memiliki keterampilan lain agar dapat diperoleh tambahan pendapatan disamping hasil pertanian. Selain ketiga syarat tersebut pemerintah juga memberikan syarat lain yaitu: transmigran tidak diperkenankan membawa anggota keluarga yang telah berusia 70+ dan bayi yang baru lahir.

### **3. Tujuan Transmigrasi**

Kepadatan penduduk yang tidak merata di setiap wilayah mengakibatkan pemerintah merencanakan program transmigrasi. Pada tahun 1997, keluarlah Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 sebagai pengganti U.U. No.3 Tahun 1972 tentang tujuan transmigrasi. Adapun tujuan transmigrasi berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 dalam Demografi Umum (2003: 126) antara lain:

- a) Untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya.
- b) Untuk meningkatkan dan meratakan pembangunan daerah.
- c) Untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dari kutipan di atas terlihat bahwa tujuan utama transmigran adalah untuk mensejahterakan para transmigran dan masyarakat yang terdapat di daerah sekitar transmigran, meratakan pembangunan daerah serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurut Bintarto (1998: 61) bahwa tujuan transmigrasi di Indonesia antara lain:

- (1) Untuk meratakan sebaran penduduk agar penduduk tidak hanya memusat di pulau Jawa, (2) Untuk menolong penduduk terutama penduduk yang miskin tanah yang berada di daerah padat memperoleh sebidang tanah di luar pulau Jawa sebagai modal usaha, (3) Untuk menumbuhkan daerah-daerah ekonomi dan pertanian yang baru diluar pulau Jawa, (4) Untuk menciptakan lapangan kerja baru diluar pulau Jawa, (5) Untuk pembangunan yang merata di seluruh wilayah

Indonesia, (6) Untuk pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia, (7) Untuk kesatuan dan persatuan bangsa, (8) Untuk memperkuat pertahanan dan keamanan nasional.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi tujuan transmigrasi itu adalah untuk meratakan sebaran penduduk terutama ke luar pulau Jawa, memberikan bantuan kepada penduduk untuk meningkatkan taraf hidup di bidang pertanian, untuk menumbuhkan daerah-daerah ekonomi dan pertanian yang baru di luar pulau Jawa, menciptakan lapangan kerja, memanfaatkan sumber-sumber alam serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa agar tercipta suatu pertahanan dan keamanan nasional.

#### **4. Syarat Daerah Pengirim dan Penerima Transmigran**

Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 Pasal 12 tentang ketransmigrasian, daerah pengirim transmigran memiliki syarat sebagai berikut:

1. Wilayah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi dan/atau terbatas lapangan kerja yang tersedia dan/atau merupakan lahan kritis.
2. Daerah yang terkena bencana alam atau gangguan keamanan.
3. Perambah hutan dan peladang berpindah.
4. Wilayah yang tempat tinggalnya dijadikan proyek pembangunan bagi kepentingan umum.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa daerah yang dapat mengirim transmigran adalah daerah yang memiliki masalah, sehingga jika masyarakat tetap tinggal di daerah tersebut tidak akan bisa untuk memperbaiki kehidupannya. Untuk itulah diadakan program transmigrasi yang diharapkan dapat memperbaiki kehidupan masyarakat di daerah tujuan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

No. KEP-231/MEN/2002 tentang Kriteria Usulan Program Penyiapan Permukiman, Perpindahan dan Penempatan serta Pemberdayaan Masyarakat Binaan dalam Penyelenggaraan Ketransmigrasian, syarat daerah penerima transmigran adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan areal yaitu: letak, luas, dan batas fisik jelas, dan lokasi diindikasikan berpotensi untuk pengembangan usaha tani/jasa/industri.
2. Status lahan bebas dari masalah, dan adanya dukungan masyarakat setempat.
3. Layak huni yaitu: bebas banjir, bukan daerah rawan bencana, sumber air bersih tersedia sepanjang tahun, dan bebas penyakit endemik.
4. Layak usaha yaitu: lokasi atau lahan potensial untuk kegiatan usaha, dan tersedia pasar untuk menampung hasil usaha.
5. Layak berkembang yaitu: aksesibilitas/ hubungan ke pusat pelayanan lancar, lokasi tidak terpencil, dan merupakan bagian dari pengembangan kawasan.
6. Layak lingkungan, yaitu: penataan ruang mengadopsi aturan konservasi lingkungan serta adanya integrasi ruang antara masyarakat setempat dan pendatang, adanya kegiatan usaha yang terus-menerus memberikan hasil, dan model usaha menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa daerah yang dapat menerima transmigran adalah daerah yang lebih baik keadaannya dari daerah pengirim, karena di daerah yang baru ini diharapkan kehidupan para transmigran dapat lebih baik dari kehidupan di daerah asal.

## **5. Jenis-Jenis Transmigrasi**

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 42 tahun 1973 tentang penyelenggaraan transmigrasi BAB III pasal 3 dinyatakan bahwa:

“Transmigrasi dapat berupa transmigrasi umum dan transmigrasi spontan (swakarsa)”. Transmigrasi umum adalah transmigrasi yang pelaksanaannya ditanggung oleh pemerintah Republik Indonesia, sedangkan transmigrasi spontan (swakarsa) adalah transmigrasi yang pelaksanaannya ditanggung oleh yang bersangkutan atau pihak lain yang bukan pemerintah Republik Indonesia. Bantuan yang diberikan kepada peserta transmigrasi umum biasanya berupa biaya

perjalanan, tempat tinggal, tanah seluas 2 hektar, serta biaya hidup sampai para transmigran memperoleh hasil panen pertama.

Selanjutnya Muhardi (1994: 144) membedakan transmigrasi dalam beberapa jenis antara lain:

- a) Transmigrasi umum yaitu transmigrasi yang seluruh biayanya ditanggung pemerintah. Pada umumnya para transmigran berasal dari penduduk padat, kekeringan, atau daerah bencana alam.
- b) Transmigrasi swakarsa yaitu transmigrasi yang berdasarkan keinginan transmigran sendiri, dan pemerintah hanya memberikan bantuan berupa lahan, fasilitas kesehatan, alat pertanian dan bibit. Bantuan pemerintah bersifat penunjang saja.
- c) Transmigrasi swakarsa mandiri, yaitu transmigrasi yang seluruh biayanya ditanggung oleh transmigran sendiri tanpa bantuan pemerintah sama sekali.
- d) Transmigrasi bedol desa, yaitu transmigrasi yang dilaksanakan oleh seluruh penduduk beserta unsur pemerintahannya. Para transmigran biasanya berasal dari daerah bencana atau terkena proyek pemerintah seperti pembangunan bendungan atau waduk. Jadi penduduk satu desa atau sekecamatan ditransmigrasikan, dan menempati satu daerah baru tanpa ada perubahan susunan pemerintahannya.
- e) Transmigrasi lokal, yaitu perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dalam propinsi atau pulau. Para transmigran biasanya berasal dari daerah bencana, proyek pemerintah, atau perambah hutan.
- f) Transmigrasi PIR (Perkebunan Inti Rakyat) atau disebut PIR Trans yang dilakukan untuk memenuhi tenaga kerja di suatu perkebunan.
- g) Transmigrasi Spontan, yaitu transmigrasi yang seluruh pembiayaannya ditanggung sendiri oleh transmigran. Pemerintah hanya menyediakan rumah dan lahan pertanian.
- h) Transmigrasi Khusus atau Sektoral, yaitu transmigrasi yang dilakukan karena penduduk terkena bencana alam.

Rukman Sardjadidjaja (2004: 28) mengemukakan bahwa program transmigrasi selain dilaksanakan oleh Departemen transmigrasi juga dilaksanakan oleh Departemen lain, sebagai berikut:

1. Transmigrasi Sosial oleh Departemen Sosial
2. Transmigrasi ABRI oleh Departemen Hankam
3. Transmigrasi Intratum ABRI oleh Departemen Hankam
4. Transmigrasi AL oleh KSAL
5. Transmigrasi AD oleh KSAD
6. Transmigrasi AU oleh KSAU
7. Transmigrasi Angkatan Kepolisian oleh KAPOLRI
8. Transmigrasi Pramuka oleh Kwartir Nasional

9. Transmigrasi Bekas Tahanan SOB oleh Pemda
10. Transmigrasi Repatriasi dari Suriname Oleh Dinas Sosial
11. Transmigrasi KNPI oleh KNPI
12. Transmigrasi Pemuda oleh KNPI
13. Transmigrasi Lokal oleh Pemda

## **6. Jenis Mata Pencaharian**

Mata pencaharian adalah jenis pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan mengetahui jenis mata pencaharian maka dapat diketahui bagaimana tingkat pendapatan seseorang dan status sosial ekonomi dalam masyarakat.

Mulvanto Sumardi (1982: 92) mengemukakan bahwa "jenis pekerjaan secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut yaitu , pegawai negeri, ABRI, pegawai swasta, wiraswasta, dan petani ". Sedangkan menurut Sisdiatmo Kusumawidho (1981: 200-201) jenis pekerjaan adalah macam pekerjaan yang sedang atau pernah dilakukan oleh orang-orang yang termasuk golongan bekerja, atau orang-orang yang mencari pekerjaan dan pernah bekerja.

Jenis pekerjaan terbagi dalam delapan golongan yaitu:

1. Tenaga profesional, teknisi dan tenaga lain
2. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan
3. Tenaga administrasi, tenaga tata usaha
4. Tenaga penjualan
5. Tenaga usaha biasa
6. Tenaga usaha pertanian
7. Tenaga produksi dan operator alat-alat pengangkut

## 8. Lain-lainnya termasuk ABRI

Menurut Frans Betsy Marojjahan Dabukke (1995: 17) ciri rumah tangga miskin adalah bermata pencaharian utama sebagai petani. Selanjutnya World Bank dalam Frans Betsy Marojjahan Dabukke (1995: 22) mengemukakan bahwa:

Rumah tangga miskin pedesaan umumnya bekerja di kegiatan-kegiatan sektor pertanian. Tahun 1990, proporsi rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 60 %. Kemiskinan berkorelasi positif dengan mata pencaharian utama sebagai petani, seiring dengan faktor rendahnya akses dan penguasaan lahan pertanian dan faktor sangat rendahnya tingkat pemilikan lahan pertanian.

Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan mata pencaharian sebagai petani dan sangat rendahnya tingkat pemilikan lahan pertanian maka akan mempengaruhi tingkat pendapatan, dengan asumsi bahwa tingkat pendapatan yang rendah maka petani akan sulit memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti: pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Hasil penelitian Skripsi Uzma Salma R. (2006: 70) mendapatkan bahwa jenis mata pencaharian transmigran sebagian besar (68%) responden memiliki pekerjaan sebagai buruh tani. Hasil penelitian Skripsi Siluh Putu Tekla Fristiana (2007: 60) mendapatkan bahwa jenis mata pencaharian transmigran seluruhnya adalah sebagai petani. Hasil penelitian skripsi Desi Herawati. (2003: 58) mendapatkan bahwa jenis mata pencaharian migran sebagian besar (85,30%) responden memiliki pekerjaan sebagai buruh tani. Selain itu berdasarkan laporan hasil penelitian Buchori Asyik, dkk (1996:23) mendapatkan bahwa jenis pekerjaan sebagian besar (66,67%) responden adalah petani.

Buruh tani dan petani merupakan jenis pekerjaan yang paling utama. Selain bercocok tanam pada umumnya transmigran memiliki pekerjaan sampingan lain



yaitu sebagai buruh pikul dan buruh bangunan. Jenis tanaman yang pada umumnya ditanam oleh kepala keluarga transmigran adalah tanaman padi dan tanaman palawija seperti: jagung, singkong, kacang tanah, dan kedelai.

## **7. Luas Pemilikan Lahan**

Bagi rumah tangga yang sumber penghasilan utamanya berasal dari sektor pertanian, maka luas sempitnya lahan pertanian yang diusahakan merupakan penentu bagi tingkat pendapatan penduduk, dengan rendahnya pemilikan lahan pertanian maka akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pada sektor pertanian.

Selanjutnya kemiskinan yang dialami oleh suatu rumah tangga ditandai oleh luas pemilikan lahan. Pemilikan atas lahan ini akan mempengaruhi terhadap tingkat pendapatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Frans Betsy Marojjahan Dabukke (1995: 21) adalah: Kemiskinan umumnya ditandai dengan faktor penguasaan aset yang rendah dan kemiskinan berkorelasi positif dengan rendahnya pemilikan dan penguasaan asset pertanian. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa rendahnya tingkat penguasaan lahan pertanian akan mempengaruhi terhadap tingkat pendapatan. Hal ini berarti kemiskinan suatu rumah tangga dapat dilihat dari faktor penguasaan lahan pertanian yang rendah.

Sukartawi (1984: 1) mengklasifikasikan luas lahan pertanian antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa sebagai berikut: Petani yang memiliki lahan sempit, yaitu lebih kecil dari 0,25 ha lahan sawah di Jawa atau 0,5 ha di luar Pulau Jawa. Bila petani tersebut juga memiliki lahan tegalan, maka luasnya 0,5 ha di Jawa dan 1,0 ha di luar Jawa. Hasil penelitian Skripsi Uzma Salma R. (2005: 95) mendapatkan

bahwa luas pemilikan lahan transmigran sebagian besar (52%) responden memiliki lahan yang tergolong sempit. Hasil penelitian Deswandi (2008: 62) mendapatkan bahwa luas pemilikan lahan transmigran sebagian besar (62%) responden memiliki lahan yang tergolong sempit. Bagi keluarga yang sumber penghasilan utamanya berasal dari sektor pertanian, apabila lahan pertanian yang diusahakan sempit maka akan rendah pula penghasilan yang didapat. Jadi luas atau sempitnya lahan pertanian merupakan faktor penentu pendapatan bagi penduduk transmigran.

### **8. Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga**

Menurut pendapat Kartono Wirosuharjo, dkk (1985: 83) menyatakan bahwa "Pendapatan adalah arus uang atau barang yang didapat oleh perseorangan, kelompok orang, perusahaan atau suatu perekonomian pada suatu periode tertentu". Berdasarkan pendapat tersebut, dalam kehidupan rumah tangga pendapatan merupakan hal yang pokok. Pendapatan dalam rumah tangga sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Jika pendapatan suatu rumah tangga tinggi, maka sudah pasti kebutuhan pokok rumah tangga tersebut akan terpenuhi. Menurut Hadi Prayitno dan Lincoln Arsvad (1987: 88) mengemukakan bahwa: "Tingkat pendapatan perkapita rumah tangga adalah pendapatan total rumah tangga dalam setahun dibagi dengan jumlah anggota rumah tangganya".

Karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari tingkat pendapatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Quibria dalam Frans Betsy Marojjahan Dabukke (1995: 16) yaitu: "salah satu karakteristik rumah tangga miskin adalah karakteristik

sumber pendapatan. Sektor pertanian dan kegiatan lain yang berhubungan langsung dengan pertanian merupakan sumber pendapatan utama bagi rumah tangga miskin. Kegiatan di bidang pertanian ditandai oleh produktivitas produksi rendah, modal rendah, dan upah yang rendah.

Tingkat pendapatan ini mengacu pada Upah Minimum Regional Lampung (UMR) pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 691.000. Hasil penelitian Skripsi Uzma Salma R. (2005: 95) mendapatkan bahwa “tingkat pendapatan transmigran sebagian besar (68,57%) responden memiliki pendapatan di bawah Rp.808.725,00 dan 31,43% responden memiliki pendapatan di atas Rp. 808.725.00”. Hasil penelitian Siluh Putu Tekla Fristiana (2007: 81) mendapatkan bahwa tingkat pendapatan yang dimiliki transmigran sebagian besar (50%) responden memiliki tingkat pendapatan rendah. Selain itu hasil penelitian skripsi Desi Herawati. (2003:60) juga mendapatkan bahwa tingkat pendapatan migran sebagian besar (85,30%) responden memiliki pendapatan rendah. Hal ini berkaitan dengan pekerjaan responden sebagai buruh tani yang berpenghasilan rendah. Kepala keluarga keturunan transmigran memperoleh pendapatan selain dari pekerjaan pokok juga mendapatkan dari pekerjaan sampingan yaitu sebagai buruh pikul dan buruh bangunan.

## **9. Jumlah Anggota Keluarga**

Menurut pendapat Quibria dalam Frans Betsy Marojjahan Dabukke (1995: 16) yang menyatakan bahwa salah satu karakteristik rumah tangga miskin adalah karakteristik demografi, diantara berbagai variabel demografi kemiskinan berhubungan langsung dengan jumlah anggota rumah tangga. Rumah tangga

miskin cenderung memiliki anggota yang sangat besar dengan beberapa orang anak dan anggota rumah tangga lain yang tergantung secara ekonomi.

Jumlah anggota keluarga adalah anggota keluarga yang masih menempati atau menghuni satu rumah dengan kepala keluarga, serta masih menjadi beban atau tanggungan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jumlah tanggungan yang dimiliki suatu keluarga akan berpengaruh terhadap besar kecilnya beban tanggungan kepala keluarga, karena semakin besar jumlah anggota keluarga maka akan mengakibatkan semakin besar pula beban yang ditanggung oleh kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Jumlah tanggungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh anggota keluarga seperti istri, anak, orang tua, saudara, atau keluarga lain yang menempati satu rumah dan masih menjadi tanggung jawab kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian skripsi Uzma Salma R. (2005: 94) mendapatkan bahwa jumlah anak yang dimiliki transmigran sebagian besar (61,43%) responden memiliki jumlah anak banyak (>3), hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang keluarga berencana (KB).

Hasil penelitian Siluh Putu Tekla Fristiana (2007: 55) mendapatkan bahwa jumlah anak yang dimiliki transmigran sebagian besar (90%) responden memiliki jumlah anak banyak. Selain itu menurut pendapat Sunarto HS (1984: 72) bahwa anak yang dimiliki oleh transmigran cenderung banyak, hal ini dikarenakan adanya perkembangan ekonomi yang lebih baik.

## **10. Tingkat Pendidikan**

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang penting bagi setiap manusia karena pendidikan akan mempengaruhi jenis mata pencaharian yang akhirnya akan berpengaruh terhadap jumlah pendapatan seseorang. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Jalur pendidikan mempunyai jenjang yang jelas mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan adalah salah satu program pemerintah yang dari tahun ke tahun mengalami pembaharuan-pembaharuan, seperti wajib belajar sembilan tahun.

Tingkat pendidikan menurut Payaman Simanjuntak (1985: 42) yaitu pendidikan yang telah ditempuh oleh seseorang melalui jenjang pendidikan sekolah seperti tidak tamat SD, tamat SD, tamat SLTP, tamat SLTA, tamat Sarjana Muda, dan tamat Sarjana.

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pada Bab VI tentang jalur, jenjang dan jenis pendidikan pasal 14 menyebutkan bahwa jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, maka tingkat pendidikan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Tamat SD dan SMP : Rendah
2. Tamat SMU/SMK : Menengah

### 3. Tamat Diploma/Sarjana : Tinggi

Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lama pendidikan sekolah yang telah dicapai dari lembaga pendidikan sekolah oleh kepala keluarga keturunan transmigran. Berdasarkan hasil penelitian skripsi Uzma Salma R. (2005: 94) mendapatkan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki transmigran sebagian besar (78,57%) responden memiliki tingkat pendidikan yang rendah yaitu sekolah dasar. Hal ini disebabkan karena pada ketidak mampuan responden untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Hasil penelitian Siluh Putu Tekla Fristiana (2007: 55) mendapatkan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki transmigran sebagian besar (90%) responden memiliki tingkat pendidikan rendah yaitu hanya tamat SD. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Buchori Asyik, dkk (1996: 34) mendapatkan bahwa pendidikan yang ditamatkan oleh transmigran sebagian besar (64,28%) hanya tamat Sekolah Dasar (SD). Pada jaman dahulu tamat Sekolah Rakyat (SR) atau Sekolah Dasar (SD) sudah dianggap baik, karena mereka yang sudah tamat SR atau SD pasti bisa membaca dan menulis.

Frans Betsy Marojjahan Dabukke (1995: 18) mengemukakan bahwa salah satu ciri penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang rendah (umumnya tidak tamat SD) sehingga waktu mereka tersita habis untuk mencari tambahan penghasilan.

## **11. Keluarga Pra Sejahtera**

BKKBN menggunakan kata kemiskinan dengan istilah pra sejahtera. Pra sejahtera menurut BKKBN adalah ketidak mampuan memenuhi kebutuhan dasar secara

minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan, dan kesehatan.

Kemiskinan menurut BPS adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan.

Indikator kemiskinan menurut BPS adalah sebagai berikut:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter<sup>2</sup> per orang.
2. Rumah kondisinya tidak layak, lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, atap dari rumbia, dan tembok tanpa diplester.
3. Dinding bangunan tempat tinggal dari kayu atau bambu atau kayu murahan.
4. Tidak mempunyai fasilitas buang air besar, menumpang, atau bersama-sama orang lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga bukan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Indikator Pra sejahtera menurut BKKBN adalah sebagai berikut :

1. Tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya
2. Tidak mampu makan 2x sehari
3. Tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja, dan bepergian
4. Bagian terluas dari rumah berlantai tanah
5. Tidak mampu membawa keluarga yang sakit ke sarana kesehatan
6. Paling kurang 1x seminggu keluarga makan daging/ikan/telur
7. 1tahun 1x seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 stel pakaian baru

Tingkat kesejahteraan keluarga dengan kategori keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 adalah kategori keluarga yang dinyatakan sebagai keluarga miskin. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini selanjutnya penulis akan menggunakan kata pra sejahtera sebagai pengganti kata kemiskinan.

Kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada dibawah standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang bekerja dan hidup sehat berdasarkan kebutuhan gizi serta cukup sandang. (Sayogyo, 1988: 7).

Berdasarkan pendapat di atas, kemiskinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu keadaan keluarga dimana pendapatan yang diperolehnya tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok bagi anggota keluarganya terutama pangan, sandang. Kebutuhan pokok yang lain bagi suatu keluarga untuk dapat hidup secara wajar adalah berupa perumahan, kesehatan, dan pendidikannya yang harus dapat dipenuhi.

Pernyataan lain menurut Totok Mardikanto (1990: 23) yang mendasarkan pada sembilan kebutuhan pokok minimal perkapita pertahun yaitu beras 140 kg, ikan asin 15 kg, gula pasir 3,5 kg, tekstil 4 meter, minyak goreng 6 kg, garam 9 kg, minyak tanah 60 liter, sabun 20 kg dan kain batik dua potong.

Menurut Emil Salim (1984: 41) bahwa kemiskinan lazimnya dilukiskan karena kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, mereka dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatannya tidak cukup untuk untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti : pangan, pakaian, tempat berteduh dan lain-lain.



Dalam menentukan garis kemiskinan sebenarnya ada cara yang lebih mudah dan umum dilakukan yang terdiri dari dua pendekatan yaitu :

- a. Pendekatan kebutuhan dasar yaitu dengan menentukan besarnya kebutuhan dasar termasuk pangan dan tidak pangan, lalu menghitung pendapatan yang dibutuhkan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut di atas pada suatu tingkat harga.
- b. Pendekatan kebutuhan pangan dasar yaitu pertama-tama menentukan pengeluaran minimum untuk memenuhi jumlah bahan makanan dan minimum lalu pengeluaran minimum ini dikalikan dengan proporsi yang sama untuk pengeluaran tidak pangan. (Quibria dalam Siswoyo, 1996: 10).

**a. Kemiskinan terdiri dari beberapa aspek yaitu:**

- 1) Kemiskinan itu bersifat multi-dimensional. Artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan asset-asset, organisasi sosial dan politik, dan pengetahuan serta keterampilan. Aspek sekunder kemiskinan berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi.
- 2) Aspek-aspek kemiskinan saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pada aspek lainnya (Hadi Prayitno & Lincoln Arsyad, 1987: 36).

**b. Ciri-Ciri Kemiskinan**

Ciri-ciri kemiskinan meliputi:

- 1) Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal, ataupun keterampilan. Faktor produksi yang dimiliki umumnya sedikit sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
- 2) Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperolehnya tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan atau modal usaha. Sementara mereka pun tidak memiliki syarat untuk terpenuhinya kredit perbankan, seperti jaminan kredit dan lain-lain yang mengakibatkan mereka beralih ke “lintah darat” yang biasanya untuk belunasannya meminta syarat-syarat yang berat dan bunga amat tinggi.
- 3) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, tidak sampai tamat Sekolah Dasar (SD). Waktu mereka umumnya habis tersita untuk mencari nafkah sehingga tak ada lagi waktu untuk belajar. Demikian pula dengan anak-anak mereka, tak dapat menyelesaikan sekolahnya karena harus membantu orang tuanya mencari tambahan penghasilan.
- 4) Banyak diantara mereka tidak mempunyai tanah, meskipun ada itupun jumlahnya relatif kecil. Pada umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar pertanian. Karena pertanian bekerja atas dasar musiman maka kesinambungan kerja menjadi kurang terjamin. Banyak diantara mereka lalu menjadi pekerja bebas (self employed) yang berusaha apa saja. Akibatnya dalam situasi penawaran tenaga kerja yang besar, maka tingkat upah menjadi rendah sehingga membuat mereka selalu hidup di bawah garis kemiskinan.
- 5) Banyak diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan (skill) atau pendidikan, sedangkan kota tidak siap

menampung gerak urbanisasi dari desa. Dengan kata lain, kemiskinan pedesaan membuahkan fenomena urbanisasi dari desa ke kota. (Hadi Prayitno & Lincoln Arsyad, 1987: 36).

## **12. Karakteristik**

Karakteristik berasal dari kata "karakter" yang berarti membunvai sifat khusus (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001: 308). Menurut pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik adalah sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh suatu benda. Karakteristik memiliki pengertian umum sebagai ciri khas atau bentuk-bentuk watak atau karakter yang dimiliki oleh setiap individu berupa corak tingkah laku, dan tanda khusus.

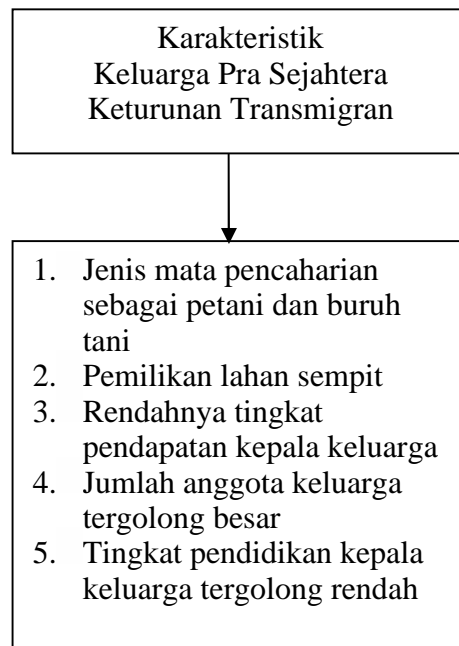
Karakteristik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah karakter sosial ekonomi keluarga pra sejahtera keturunan transmigran dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang meliputi umur, jenis mata pencaharian, luas pemilikan lahan, tingkat pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan tingkat pendidikan.

### **B. Kerangka Pikir**

Penanggulangan kemiskinan dan ketidakmerataan penduduk merupakan salah satu masalah pokok dalam pembangunan nasional. Terjadinya pemindahan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain adalah keadaan daerah asal yang kurang baik dan adanya daya tarik dari daerah tujuan yang dikenal dengan istilah *Differensiation of Area* yaitu perbedaan suatu wilayah ini akan mencerminkan karakteristik kehidupan penduduknya. Daerah yang surplus yang memberikan banyak kemudahan-kemudahan seperti kemudahan mendapatkan pekerjaan, kemudahan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi akan menarik

penduduk yang berada pada daerah minus untuk melakukan pemindahan. Hal inilah yang menyebabkan penduduk untuk melakukan transmigrasi dari daerah asal yang padat penduduknya ke daerah tujuan yang jarang penduduknya.

Untuk itulah pemerintah mengadakan program transmigrasi sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan serta untuk meningkatkan dan meratakan pembangunan daerah. Namun pada kenyataannya program pemerintah tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan lancar. Hal ini terlihat di Desa Bagelen yang merupakan daerah kolonisasi pertama di Indonesia yang masih banyak terdapat keluarga pra sejahtera. Untuk memperjelas kerangka pikir maka dapat dilihat pada bagan kerangka pikir berikut:



Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir